



DIY Kembali Catatkan Rekor Baru Kasus Covid-19

Jumlah Pasien Terinfeksi Kemarin Capai 478

YOGYA, TRIBUN - Memasuki 12 hari pemberlakuan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM), kasus Covid-19 di DIY justru meningkat tajam. Penambahan kasus harian Covid-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi, yakni sebanyak 478 kasus.

Hasil itu diperoleh dari pemeriksaan sebanyak 1.121 sampel dari 1.055 orang. Dengan demikian sejauh ini telah ada 18.736 kasus positif yang dilaporkan.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penan-

anganan Covid-19 di DIY, Berty Murtining-sih, menjelaskan, rincian persebaran kasus berdasarkan wilayah. Yakni, Kota Yogya sebanyak 119 kasus, Sleman (119 kasus), disusul Bantul (97 kasus), Kulon Progo (66 kasus), dan Gunungkidul (77 kasus).

Di sisi lain, kasus sembuh juga mengalami penambahan. Yakni, sebanyak 374 kasus. "Sehingga total kasus sembuh menjadi 12.427 kasus," kata Berty, Jumat (22/1).

Dari paparan data itu, tingkat kesembuhan atau *case recovery rate* di DIY adalah 66,33 persen. Adapun distribusi kasus sembuh menurut domisili wilayah kabupaten dan kota adalah Kota Yogyakarta 100 kasus, Bantul 49

kasus, Kulon Progo dua kasus, Gunungkidul tiga kasus, dan Sleman 220 kasus.

Berty juga melaporkan penambahan kasus meninggal yakni sebanyak lima kasus. Sehingga total kasus meninggal menjadi 422 kasus. "DIY mencatatkan tingkat kematian 2,25 persen. Ketika disinggung apakah rekor ini didapat dari hasil kontak tracing selama libur natal dan tahun baru, Berty tak memberikan jawaban tegas. "Bisa demikian," ujarnya singkat.

Hingga saat ini, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY belum bisa menunjukkan

● ke halaman 15

DIY Kembali

● Sambungan Hal 9

data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan kepada publik. Sebab proses perbaikan masih berlangsung.

"Kalau datanya memang ada, hanya sistem sedang integrasi antara RS online dg SI SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) sehingga nanti bisa di-publish lebih komprehensif," paparnya.

Berpikir panjang

Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY masih berpikir panjang apabila harus menerapkan karantina wilayah sebagai langkah penanganan Covid-19. Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY menyadari, beberapa kebijakan sudah dilakukan mulai Maret ketika awal pertama pandemi masuk ke DIY.

Saat itu beberapa desa mulai berlakukan pembatasan berupa penjagaan akses masuk desa yang dibuat satu pintu. Namun tetap saja kasus Covid-19 terus bergerak dan penularan tetap saja masif. Kebijakan untuk melakukan pembatasan di tem-

pat-tempat wisata pun telah dilakukan. Namun tetap saja hal itu tidak membuat kondisi kian membaik.

Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, turut prihatin akan tingginya penambahan kasus pada Kamis (21/1) kemarin yang sebanyak 456 kasus terkonfirmasi positif. Padahal kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) telah dilakukan selama sepekan lebih di DIY. Di hari yang sama, Bupati Sleman Sri Purnomo juga membuat pernyataan jika dirinya telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari indikator tersebut, Gugus Tugas penanganan Covid-19 masih belum berani mengambil langkah karantina wilayah atau menutup sepenuhnya wilayah DIY untuk beberapa waktu.

"Itu yang menurut kami sulit," Kata Biwara.

Biwara enggan menjelaskan alasan mengapa langkah karantina wilayah dirasa olehnya sebuah hal yang sulit dilakukan di DIY. Di satu sisi penerapan kebijakan PSTKM diklaim oleh sejumlah pelaku usaha baik itu perhotelan dan

pedagang di kawasan Malioboro terlalu memberatkan. Sementara penekanan kasus dari kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan.

Sebagai contoh, sejak Oktober hingga hari ini saja sudah ada 10 toko di Malioboro yang tidak mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. "Memang serangan Covid-19 itu tidak pandang bulu. Persoalannya justru mengapa kemarin kasusnya kok sampai 456 kasus," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, memiliki alasan realistis mengapa DIY tidak ingin menerapkan karantina wilayah. Huda menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pemerintah DIY tidak memilih mengambil langkah karantina wilayah.

Pasalnya, menurut dia anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) 2021 kali ini hanya sebesar Rp66 miliar. Dana sebanyak itu dikalkulasi olehnya tidak akan cukup memberikan jaminan kepada seluruh warga DIY apabila karantina wilayah dilakukan.

Namun demikian, menurutnya kebijakan karantina wilayah dapat saja dilakukan

apabila kedaruratan memang sudah tidak terkendali. "Dulu BTT kita Rp600 miliar. Itu hanya cukup memberikan jaminan hidup selama tiga bulan saja. Itu pun hanya cukup sekitar 150 ribu KK. Kalau DIY ambil karantina wilayah, duitnya gak ada," katanya.

Menurut Huda, kebijakan PSTKM adalah keterpaksaan yang harus dilakukan agar kasus baru dapat ditekan. Meskipun saat ini sudah ada 10 toko di kawasan Malioboro telah gulung tikar lantaran tak sanggup bertahan.

"Saya kira PSTKM dulu, kalau Karantina wilayah belum. Karena nanti pemda harus mensupport warga yang dikarantina. Gak ada duit kita. Dan PSTKM ini kan keterpaksaan. Kami tidak ingin ada pembatasan-pembatasan," tegasnya.

Huda berharap kebijakan PSTKM ini menjadi kebijakam terakhir pemerintah, supaya dampak ekonomi akibat hal itu tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, anggota Fraksi PKS ini mengimbau agar warga DIY mematuhi kebijakan PSTKM yang saat ini sedang berlangsung dan rencananya akan diperpanjang sesuai keputusan pemerintah pusat ini. (tro/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005